



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUCIATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **659202**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m²/45 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **208.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **30.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **15.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.153.500.000**

III. HUTANG Rp. **147.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.006.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIS DAULAY
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664798

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI		
Rp. 380.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/30 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI		
Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	17.500.000
1. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 11.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FINO MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI		
Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	603.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	603.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SUMITRO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **664816**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 835.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA BINTAN, WARISAN Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **6.200.000**

1. MOTOR, MEREK VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **3.877.139**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.260.077.139**

III. HUTANG Rp. **71.600.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.188.477.139**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.000.000
III. HUTANG	Rp.	44.736.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-38.736.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERVINA SARI**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **664823**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 244.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 135.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 9.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.400.563

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 400.900.563

III. HUTANG

Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 380.900.563



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSDEL**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **664835**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	140.000.000
1. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.071.674
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	205.071.674
III. HUTANG	Rp.	24.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	181.071.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.